

**ANALISIS KINERJA BELANJA DALAM LAPORAN REALISASI
ANGGARAN (LRA) PADA SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
KOTA TANJUNGPINANG**

SKRIPSI

**ANATASYA VERONIKA OSCAR
18622052**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2022**

**ANALISIS KINERJA BELANJA DALAM LAPORAN REALISASI
ANGGARAN (LRA) PADA SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
KOTA TANJUNGPINANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat guna Memperoleh Gelar
Sarjana Akuntansi

OLEH

**NAMA : ANATASYA VERONIKA OSCAR
NIM : 18622052**

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN/ PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS KINERJA BELANJA DALAM LAPORAN REALISASI
ANGGARAN (LRA) PADA SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
KOTA TANJUNGPINANG**

Diajukan kepada :

Panitia Komisi Ujian
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang

Oleh :

NAMA : ANATASYA VERONIKA OSCAR
NIM : 18622052

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

Salihi S.E., M.Ak
NIDN. 8823501019/ Asisten Ahli

M. Isa Alamsyahbana, S.E., MAk
NIDN. 1025129302/ Asisten Ahli

Menyetujui,
Ketua Program Studi

Hendy Satria, S.E., M.Ak
NIDN 1015069101/ lektor

Skripsi Berjudul

**ANALISIS KINERJA BELANJA DALAM LAPORAN REALISASI
ANGGARAN (LRA) PADA SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
KOTA TANJUNGPINANG**

Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

NAMA : ANATASYA VERONIKA OSCAR
NIM : 18622052

Telah dipertahankan di depan Panitia Komisi Ujian Pada Tanggal
Enam Belas Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua dan
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat untuk Diterima

Panitia Komisi Ujian

Ketua,

Sekretaris,

Salihi, S.E., M.Ak
NIDN. 8823501019/ Asisten Ahli

Afriyadi, S.T., M.M
NIDN. 1003057101/ Asisten Ahli

Anggota,

Hasnarika, S.Pd., M.Si
NIDN. 1020118901/ Asisten Ahli

Tanjungpinang, 16 Agustus 2022
Ekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang,
Ketua,

Charly Marlinda, S.E., M.Ak.Ak.CA
NIDN. 1029127801/ Lektor

PERNYATAAN

Nama : Anatasya Veronika Oscar
Nim : 18622052
Tahun Angkatan : 2022
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,63
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Kinerja Belanja dalam Laporan Realisasi
Anggaran (LRA) pada Sekretariat DPRD Kota
Tanjungpinang

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa seluruh isi dan materi dari skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan rekayasa maupun karya orang lain. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata di kemudian hari saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang, 16 Agustus 2022

Penyusun,

Anatasya Veronika Oscar
NIM : 18622052

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirrabil'alamin..

Paling pertama dan utama ialah rasa syukur tiada hentinya kepada Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat, ridho, kasih sayang serta kemudahan dalam setiap langkah yang ku tempuh. Semua ini dapat kulalui atas izin-Mu, aku sangat bersyukur karena kau tak pernah meninggalkanku, selalu dekat denganku dan menemaniku dalam setiap langkah perjalanan yang ku lalui.

Terima kasih yang tak dapat terucap banyaknya kepada mama dan papa. Berkat mama dan papa, Tasa dapat sampai ke titik ini. Sungguh besar jasa dan pengorbanan mama papa untuk Tasa, sedari Tasa masih di kandungan hingga sampai sekarang, rasa kasih sayang yang tak pernah putus. Tasa bersyukur terlahir didunia menjadi anak mama dan papa. Semoga Tasa bisa membahagiakan mama dan papa kelak.

HALAMAN MOTTO

Believe that in every pain have beautiful side and you will pass over it.

(penulis)

Apapun yang belum sempat tergapai oleh angan dan kenyataan, percayalah semua sudah daitur sedemikian rupa hingga kita lupa bahwa pernah luka.

(penulis)

Semua yang patah akan tumbuh

(Banda Niera)

“Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu.”

(Ali bin Abi Thalib)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Kinerja Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang” yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata 1 (S1) Program Studi Akuntansi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang.

Dalam hal ini penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi, oleh karena itu penulis mengharapkan kritikan serta saran yang bersifat membangun guna menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dalam penyusunan skripsi ini banyak pihak-pihak yang turut serta membantu dan mendukung pembuatan skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Ibu Charly Marlinda, S.E., M.Ak., CA selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
2. Ibu Ranti Utami, S.E., M.Si.Ak.CA. Selaku Wakil Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
3. Ibu Sri Kurnia Kurnia, S.E., M.Si.Ak.CA. Selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
4. Bapak Imran Ilyas, M.M selaku Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

5. Bapak Hendy Satria, S.E., M.Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
6. Bapak Salihi, S.E., M.Ak selaku dosen pembimbing I yang telah mempercayai dan memberi dukungan kepada saya untuk terus maju dan menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas bimbingan, memberikan arahan, saran, masukan pada penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Bapak Muhammad Isa Alamsyahbana, S.E., M.Ak selaku pembimbing II yang sudah memberikan arahan, membantu, memberi saran serta masukan agar skripsi ini selesai dengan baik.
8. Seluruh dosen pengajar dan staf sekretariat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
9. Mama, Papa yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang dan terus berusaha memberikan yang terbaik, terimakasih atas semuanya ma, pa. Kedua adikku Rifky dan Qila yang membuatku terus bangkit, berjuang menyelesaikan ini semua, selalu jadi penyemangat sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
10. Untuk seluruh anggota keluarga ku, terima kasih atas doa, semangat, dukungan, nasihat, pembelajaran dan banyak lagi sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik.
11. Teman-temanku tersayang, se-pergalauan dan se-perhealinganku, Kak Sari, Yuli, Rodika yang tak hentinya memberikan dukungan, pembelajaran serta

motivasi satu sama lain sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan lancar.

12. Shika Meylani Putri yang sudah menjadi adik sekaligus kakak, teman, penasihat, pemberi saran, semua-semua yang baik. Mari kita tumbuh bersama menjadi orang sukses agar bisa terus jalan-jalan.
13. Melati Nada Salsabila yang telah menjadi teman yang sangat sefrekuensi sedari SMA. Lambang Pramusinto yang sudah saling mendukung dan selalu mengatakan kamu pasti bisa. Dewi Nopitasari yang telah menjadi teman baik dalam menjalani perkuliahan di kelas, organisasi, skripsi, seminar dan jalan-jalan.
14. Teman-teman Akuntansi Pagi 2 yang telah menemani perjalananku dari 2018 hingga penyusunan skripsi ini, terimakasih atas semuanya, senang bertemu dengan kalian, sukses selalu untuk kita.
15. Sekretariat DPRD Kota Tanjungpinang, Bagian Program dan Keuangan, Ibu Lusi Susanti, S.E, Ibu Idawati S.Sos, Bapak H. Efendi S.Sos., M.M dan seluruh staff yang telah membantu dan meluangkan waktu hingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.
16. Untuk ‘teman-temanku’ yang tidak ku sebutkan namanya. Terima kasih atas waktu dan semangat yang pernah diberikan.
17. Semua pihak yang terkait dalam penyusunan skripsi, yang tidak dapat dituliskan satu persatu, terimakasih atas semuanya.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya mahasiswa/I jurusan akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

Tanjungpinang, 21 Juli 2022

Penulis

ANATASYA VERONIKA OSCAR
NIM 18622052

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI UJIAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
HALAMAN MOTTO	
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRAC.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Batasan Masalah.....	11
1.4 Tujuan Penelitian.....	11
1.5 Kegunaan Penelitian.....	12
1.5.1 Kegunaan Ilmiah.....	12
1.5.2 Kegunaan Praktis	13
1.6 Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15

2.1 Akuntansi Sektor Publik.....	15
2.1.1 Definisi Akuntansi Sektor Publik	15
2.1.2 Tujuan Akuntansi Sektor Publik.....	16
2.1.3 Karakteristik Akuntansi Sektor Publik	18
2.2 Pemerintah Daerah	18
2.3 Penganggaran Sektor Publik.....	20
2.3.1 Pengertian Anggaran Sektor Publik.....	20
2.3.2 Fungsi Anggaran Sektor Publik	21
2.4 Analisa Laporan Keuangan	22
2.4.1 Definisi Analisa Laporan Keuangan.....	22
2.4.2 Komponen Laporan Keuangan	23
2.5 Kinerja Anggaran Belanja	26
2.6 Analisis Belanja.....	26
2.7 Kerangka Pemikiran	35
2.8 Penelitian Terdahulu.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	40
3.1 Jenis Penelitian	40
3.2 Jenis data	41
3.3 Teknik Pengumpulan Data	42
3.4 Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	46
4.1 Hasil Penelitian.....	46
4.1.1 Gambaran Umum Sekretariat DPRD Kota Tanjungpinang.....	46
4.1.1.1 Struktur Organisasi	49

4.1.2 Analisis Data.....	51
4.1.2.1 Analisis Varians.....	51
4.1.2.2 Analisis Pertumbuhan Belanja.....	52
4.1.2.3 Analisis Keserasian Belanja	52
4.1.2 Analisis Rasio Efisiensi Belanja.....	55
4.2 Pembahasan	56
4.2.1 Analisis Varians Belanja.....	56
4.2.2 Analisis Pertumbuhan Belanja.....	57
4.2.3 Analisis Keserasian Belanja.....	60
4.2.4 Analisis Rasio Efisiensi	64
BAB V PENUTUP.....	66
5.1 Kesimpulan.....	66
5.2 Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
<i>CURICULUM VITAE</i>	

DAFTAR TABEL

No	Judul Tabel	Halaman
1.	Data belanja pada Laporan Realisasi DPRD Kota Tanjungpinang.....	8
2.	Kerangka Pemikiran.....	35
3.	Bagan Susun Oganisasi Skeretariat DPRD Kota Tanjungpinang 2021... ..	50
4.	Analisis Varians Belanja Tahun 2018 – 2020.....	51
5.	Analisis Pertumbuhan Belanja Tahun 2018 – 2020.....	52
6.	Analisis Keserasian Belanja terhadap Belanja Operasi	53
7.	Analisis Keserasian Belanja terhadap Belanja Modal	54
8.	Analisis Rasio Efisiensi Belanja	55

DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran
Lampiran I	: Daftar Wawancara
Lampiran II	: Jawaban Wawancara
Lampiran III	: Dokumentasi Wawancara
Lampiran IV	: Laporan Realisasi Anggaran Belanja Sekretariat DPRD Kota Tanjungpinang 2018 – 2020
Lampiran V	: Surat Keterangan Selesai Penelitian
Lampiran VI	: Plagiarisme

ABSTRAK

ANALISIS KINERJA BELANJA DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) PADA SEKRETARIAT DPRD KOTA TANJUNGPINANG

Anatasya Veronika Oscar, 18622052, Akuntansi, STIE Pembangunan Tanjungpinang
anatasyaoscar@gmail.com

Pengelolaan sumber daya pada daerah otonom oleh pemerintah daerah membutuhkan anggaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Anggaran tersebut akan direalisasikan sebagaimana mestinya. Kaitan antara anggaran dan realisasi dapat menjadi tolak ukur dalam menilai keefektifan dalam pengambilan keputusan dan dapat menjadi evaluasi kinerja sebagai perwujudan dari pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan. Perangkat daerah kabupaten atau kota salah satunya adalah sekretariat DPRD. Sekretariat DPRD ialah penyelenggara administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan serta pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, salah satunya ialah Sekretariat DPRD Kota Tanjungpinang. Terdapat laporan realisasi anggaran yang penting yakni belanja daerah. Analisis belanja dapat dilakukan guna melihat secara ekonomis, efektif dan efisien pemakaian APBD oleh pemerintah.

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Menggunakan data primer berupa wawancara dengan narasumber yang berkaitan langsung dengan penelitian dan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) belanja Sekretariat DPRD Kota Tanjungpinang tahun 2018 – 2020. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi, wawancara dan studi pustaka. Menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dalam analisis kinerja belanja yakni analisa terhadap varians belanja, pertumbuhan belanja, keserasian belanja dan rasio efisiensi belanja.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja belanja Sekretariat DPRD Kota Tanjungpinang 2018 - 2020 dikatakan baik dan optimal, pada pertumbuhan belanjanya menunjukkan pertumbuhan yang positif walaupun pada 2020 terjadi penurunan persentase menjadi negatif dikarenakan pandemi. Kemudian belum adanya keserasian belanja sehingga belum adanya keseimbangan anggaran dan realisasi belanja pada tahun 2018 – 2020. Tingkat penghematan yang dilakukan Sekretariat DPRD Kota Tanjungpinang pada rasio efisiensi belanja stabil dan sudah melakukan penghematan anggaran belanja dengan tingkat rasio 92,16%.

Kata Kunci : Anggaran dan realisasi, analisis belanja, kinerja belanja.

Dosen Pembimbing 1 : Salihi, S.E., M.Ak

Dosen Pembimbing 2 : M. Isa Alamsyahbana, S.E., M.Ak

ABSTRAC

PERFORMANCE ANALYSIS OF EXPENDITURE IN THE REPORT OF BUDGET REALIZATION (LRA) AT SECRETARIAT DPRD OF TANJUNGPINANG CITY

Anatasya Veronika Oscar, 18622052, *Accounting*, STIE Pembangunan
Tanjungpinang
anatasyaoscar@gmail.com

The management of regional budget resources requires autonomy for the regional government. achieve the goals that have been set. The budget will then be realized as it should be. The link between budget and realization can be used as a benchmark in assessing effectiveness in decision making and can be used as a performance evaluation as a manifestation of the implementation of planned activities. One of the district or city regional apparatuses is the DPRD secretariat. The DPRD Secretariat is the organizer of secretarial administration, financial administration and supports the implementation of DPRD tasks and functions, one of which is the Tanjungpinang City DPRD Secretariat. There is an important budget realization report, namely regional expenditure. Expenditure analysis can be done in order to see economically, effectively and efficiently the use of APBD by the government.

The type of research used is qualitative research with descriptive methods. Using primary data in the form of interviews with sources that are directly related to research and secondary data in the form of a Budget Realization Report (LRA) for the Tanjungpinang City DPRD Secretariat spending in 2018 - 2020. Data collection techniques are documentation, interviews and literature studies. Using qualitative descriptive analysis techniques in the analysis of spending performance, namely the analysis of spending variance, spending growth, shopping compatibility and spending efficiency ratios.

The results showed that the spending performance of the Tanjungpinang City DPRD Secretariat 2018 - 2020 was said to be good and optimal, the spending growth showed positive growth although in 2020 there was a decline in the percentage to negative due to the pandemic. then there is no shopping compatibility so that there is no balance between the budget and the realization of spending in 2018 - 2020. The level of savings made by the Tanjungpinang City DPRD Secretariat in the expenditure efficiency ratio is stable and has made budget savings with a ratio of 92.16%.

Keywords: Budget and realization, expenditure analysis, expenditure performance.

Advisor 1 : Salihi, SE, M.Ak

Advisor 2 : M. Isa Alamsyahbana, SE, M.Ak

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam suatu pemerintahan mempunyai tugas-tugas penting yang harus dilaksanakan guna mengelola dan mengatur kepentingan masyarakat serta Negara. Tugas penting serta tanggungjawab yang menjadi kewajiban pemerintah daerah menurut UU No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah menyelenggarakan asas otonomi, yang melingkupi anggaran yakni APBN yang ditetapkan undang undang, lalu APBD ditetapkan oleh peraturan daerah. Hal tersebut termasuk ke dalam tugas pemerintah untuk mengelola wilayahnya.

Setelah ditetapkannya daerah-daerah di Indonesia untuk menyelenggarakan otonomi daerah, semakin tinggi pula keinginan dan tuntutan terhadap terciptanya *good governance*. *Good governance* ialah konsep yang berfokus pada proses pencapaian serta keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Konsep *good governance* ini dapat kita pahami dari prinsip-prinsip di dalamnya. Berdasarkan prinsip-prinsip ini akan kita dapatkan tolak ukur kinerja pada suatu pemerintahan dan menjadi sesuatu hal yang baru, yakni masyarakat ingin terciptanya pemerintah yang baik dari kinerja aparatur pemerintah (*Pengertian, Prinsip dan Penerapan Good Governance di Indonesia*, 2017). Konsep ini ditemukan pada saat kinerja pemerintahan dinilai kurang efektif yang dipercaya sebagai pengayom dan pengelola asset-asset

Negara. Tentu saja jika kita menginginkan agar *good governance* berjalan dengan semestinya, Semua elemen masyarakat harus berturut serta dalam penyuksesannya. Dibutuhkannya komitmen serta pertanggungjawaban dari pemerintah, dan juga masyarakat. Dengan adanya dan terlaksananya *good governance*, adalah kunci utama demi terciptanya keinginan masyarakat dan pemerintah dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan guna mengedepankan bangsa dan Negara serta masyarakat di dalamnya.

Sesuai dalam Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka tanggungjawab dan kekuasaan akan seluruhnya beralih pada pemerintah untuk mengatur dan mengelola sendiri daerah dan sumber daya secara maksimal. Karena tiap-tiap daerah memiliki potensi pengembangan dan pengelolaan sendiri, maka hal tersebut dilaksanakan agar tercipta pemerataan dan kesepadanan dalam keuangan antara pusat dan daerah.

Daerah yang otonom, seharusnya mempunyai kemampuan keuangan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Daerah yang dapat dikatakan mandiri apabila berkurangnya ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat. Pelaksanaan otonomi daerah guna memperbaiki kesejahteraan rakyat adalah hal yang penting (Sajow et al., 2017).

Menurut Palimbongan (2019) bentuk penyelenggaraan otonom daerah salah satunya adalah pengelolaan sumber daya secara efektif dan efisien guna mencapai akuntabilitas publik. Usaha yang dapat dilakukan dalam

melaksanakan transparansi serta akuntabilitas pada pemerintah yakni mewajibkan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan negara secara tepat waktu dan dengan jangkauan yang luas bagi setiap pengelolaan negara (Makka et al., 2015).

Pengelolaan sumber daya pada daerah otonom oleh pemerintah daerah membutuhkan anggaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Penyusunan anggaran dalam pembiayaan di suatu instansi pemerintah merupakan salah satu elemen penting dalam mengelola instansi tersebut untuk mencapai hasil yang maksimal (Sajow et al., 2017).

Menurut Mahmudi (2016a) anggaran itu bisa kita katakan sebagai sebuah rencana berjangka pendek dalam sebuah organisasi yang pernyataannya menggunakan bentuk keuangan. Sedangkan menurut Sujarweni (2015) menyatakan bahwa anggaran merupakan suatu rencana keuangan yang melingkupi rancangan atau estimasi pengeluaran yang telah disepakati, serta sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayai dalam periode waktu yang telah ditentukan. Fungsi anggaran ini terutama pada pemerintah daerah adalah untuk mengatur dan menentukan besarnya pendapatan serta pengeluaran, lalu juga berfungsi sebagai sarana dalam menentukan keputusan yang diambil dan rencana-rencana pembangunan kedepan.

Penganggaran merupakan nilai estimasi yang berupa perencanaan. Nilai yang telah dianggarkan kemudian dicantumkan dalam laporan keuangan. Akuntansi sektor publik mempunyai peran penting dalam penyusunan dan

penyajian laporan keuangan sektor publik itu sendiri. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari sistem akuntansi yang dimana manfaatnya adalah untuk memberikan informasi kepada para pengambil keputusan (Mahmudi, 2016b). Sehingga selain manfaat tersebut, laporan keuangan ini juga berguna sebagai pemberi informasi mengenai keuangan serta sebagai alat akuntabilitas serta evaluasi kinerja terkhusus pada kinerja keuangan. Nilai anggaran yang ditelah dianggarkan serta nilai realisasi tercantum pada Laporan Realisasi Anggaran. Menurut Makka et al (2015) manfaat Laporan Realisasi Anggaran yang telah dikeluarkan ialah dapat menilai kinerja keuangan daerah. LRA menempati posisi terpenting karena LRA adalah jenis laporan keuangan yang lebih awal dihasilkan sebelum neraca, laporan operasional serta laporan arus kas. Selain itu, yang kita tahu bahwa anggaran ibarat tiang atau penonggak dalam penyelenggaraan pemerintah serta pembangunan daerah. Karena hal tersebut, laporan realisasi perlu ada dan sangat penting.

Laporan keuangan pada pemerintahan atau sektor publik mempunyai perbedaan dengan laporan keuangan sektor privat jika dilihat dari bentuk pelaporan beserta elemen-elemen penyusun laporan keuangan serta standar akuntansi yang menjadi acuan dan petunjuk dalam menyusun laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan sektor publik meliputi neraca, LRA, LO, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan inilah yang diolah dan dibentuk dalam pemerintahan baik pusat maupun daerah. Peran utama laporan keuangan

ini adalah untuk memberikan informasi mengenai keuangan kepada para pihak yang berkepentingan. Karena itu, jika laporan keuangannya tidak ada maka mengakibatkan lemahnya akuntabilitas.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) mempunyai komponen keuangan yang berisikan informasi tentang realisasi pendapatan, transfer, belanja, surplus/defisit, serta lain-lain. Akun-akun belanja hanya ada di dalam LRA, belanja daerah merupakan pengeluaran-pengeluaran dari rekening daerah yaitu kas umum yang kemudian menyusutkan saldo anggaran lebih pada tempo waktu sesuai dengan tahun anggarannya. Dilihat dari fungsi anggaran pemerintah daerah tersebut maka anggaran ini dinilai cukup penting untuk keberlangsungan perkembangan dan pembangunan suatu daerah. Ketika suatu anggaran telah direalisasikan dan nilai antara penganggaran dan realisasinya sesuai, maka disitulah kinerja pemerintah dinilai. Dapat kita lihat berdasarkan seberapa besar kesesuaian antara nilai yang dianggarkan dengan pewujudannya.

Kaitan antara anggaran dan realisasinya juga dapat menjadi tolak ukur dalam menilai keefektifan dalam pengambilan keputusan dalam penganggaran dan pembiayaan selama periode anggaran sehingga menurut Makka et al., (2015) pembaca laporan keuangan dapat membuat analisis kinerja laporan keuangan berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran yang telah dipublikasikan tersebut.

Hasil dari analisis yang dilakukan oleh pembaca laporan keuangan dapat berupa hasil kinerja pada perusahaan atau instansi. Kinerja (*performace*)

menurut Mohamad Mahsun (2016) ialah penggambaran tentang tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi. Sedangkan pengukuran kinerja adalah proses penilaian kesesuaian antara program atau kegiatan yang sudah ditetapkan sesuai dengan rencana dan untuk menilai apakah telah tercapai tujuan yang telah ditetapkan pada saat perencanaan (Palimbongan, 2019).

Kinerja dan pengukurannya ini dapat diterapkan untuk dapat mengevaluasi perwujudan dari pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan. Kinerja juga dapat melihat apakah dalam suatu instansi terutama pemerintahan telah mencapai kriteria yang telah diputuskan atau ditetapkan. Kriteria dapat berupa tujuan, target, yang ingin dicapai. Dari hal tersebut didapatkan bahwa kinerja merupakan hal yang penting dan kinerja dapat diukur menggunakan pengukuran kinerja.

Kinerja keuangan salah satu alat pengukurannya ialah analisis belanja. Belanja daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Mahmudi (2016b) adalah seluruh pengeluaran yang mengurangi kekayaan atau modal dana lancar dari rekening KUD dalam periode yang telah ditentukan kemudian tidak akan memperoleh pembayaran kembali dari pemerintah daerah. Dari belanja daerah tersebut, dapat kita lihat pengeluarannya. Sebelum terjadinya pengeluaran, maka dana yang belum dikeluarkan tersebut dianggarkan terlebih dahulu. Kemudian akan menjadi pengeluaran bagi daerah yang disebut dengan belanja. Menurut Mahmudi (2016b) belanja dalam laporan keuangan adalah

bagian penting sehingga menjadi sorotan karena masyarakat sebagai pemberi dana melalui pajak daerah. Masyarakat berkepentingan untuk mengetahui apakah dana yang telah mereka keluarkan telah dikelola dengan baik dan semestinya serta bertujuan untuk kepentingan publik. belanja juga mencerminkan kebijakan pemerintah dalam pembangunan. Analisis belanja penting untuk dilakukan karena dapat menjadi evaluasi bagi pemerintah yang telah menggunakan APBD, analisis belanja tersebut dapat melihat secara ekonomis, efektif dan efisien pemakaian APBD oleh pemerintah. Dengan diberlakukannya anggaran berbasis kinerja menjadi motivasi untuk melakukan efisiensi/ penghematan atas anggaran. Pemerintah tidak harus lagi berpegang untuk menghabiskan anggara melainkan berorientasi pada *output* serta *outcome* nya. Adapun analisis belanja menurut (Mahmudi, 2016b) terdiri atas analisis varians, analisis pertumbuhan belanja, analisis keserasian belanja dan analisis rasio efisiensi belanja.

Pada pemerintahan daerah, terdapat struktur pemerintahan daerahnya. Perangkat daerah kabupaten atau kota salah satunya adalah sekretariat DPRD. DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang memiliki posisi sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah bersama dengan pemerintah daerah. Kemudian, penyelenggara administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan serta pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD ialah Sekretariat DPRD (Siregar, 2015).

Dalam penyelenggaraan administrasi keuangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terdapat laporan keuangan, salah satu laporan penting ialah Laporan Realisasi Anggaran. Laporan realisasi anggaran berisi tentang anggaran yang telah dibentuk dan dianggarkan yang kemudian anggaran tersebut akan direalisasikan yang salah satunya adalah belanja daerah. Anggaran belanja ini ketika telah disetujui maka dapat menunjang pembelanjaan daerah yang nantinya akan bermanfaat bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, selain itu dengan adanya anggaran yang bersifat sebagai tiang akan menjadikan suatu organisasi lebih terarah dalam melakukan kegiatan ataupun program. Sehingga disini perlu adanya laporan keuangan berupa laporan realisasi anggaran yang akan mengukur tingkat anggaran yang telah terealisasi. Berikut ini adalah data belanja pada Laporan Realisasi Anggaran DPRD Kota Tanjungpinang tahun 2018 – 2020.

Tabel 1.1
Data Belanja pada Laporan Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD
Kota Tanjungpinang
2018 – 2020

No	Tahun	Anggaran	Realisasi
1	2018	Rp 45.753.297.867,00	Rp 42.210.494.641,00
2	2019	Rp 53.973.327.748,00	Rp 49.987.303.944,00
3	2020	Rp 47.562.920.498,44	Rp 43.588.381.139,00

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2018-2020

Dari data di atas, dapat kita lihat nilai anggaran belanja beserta realisasinya dari tahun 2018 sampai dengan 2020. Dari data diatas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran belum pernah mencapai anggaran yang direncanakan.

Keterkaitan antara anggaran dan perwujudannya sangatlah erat, dimana kita bisa melihat seberapa besar kinerja keuangan yang telah dihasilkan oleh pemerintah daerah terkhusus pada Sekretariat DPRD kota Tanjungpinang dengan cara seberapa besar ketepatan dan kesesuai antara nilai yang telah dianggarkan dengan nilai realisasinya. Kemudian, dari sumber berita CNN 28 Agustus 2021 dikatakan bahwa anggaran belanja pejabat yang tidak peka pandemi. Dari fenomena ini dapat kita analisis anggaran dan realisasi belanjanya untuk melihat bagaimanakah kinerja belanja berdasarkan empat indikator analisis belanja dari tahun 2018 - 2020.

Menurut Mahmudi (2016) berdasarkan informasi yang terdapat dalam LRA, kita dapat membuat analisis anggaran, khususnya pada analisis belanja daerah yang berupa analisis varians belanja, analisis pertumbuhan belanja, analisis keserasian belanja dan analisis efisiensi belanja. Pengukuran kinerja ini dapat kita ketahui dengan menggunakan analisis varians guna mengetahui selisih antara anggaran dan perwujudan yang telah dilakukan. Selanjutnya, untuk mengetahui pertumbuhan belanja tahun ke tahun apakah mengalami penurunan atau peningkatan maka analisis yang bisa kita gunakan adalah analisis pertumbuhan belanja. dimana analisis ini akan melihat dan menarik kesimpulan bagaimanakah keadaan DPRD Kota tanjungpinang apakah mengalami peningkatan atau penurunan dalam pertumbuhannya. Analisis keserasian belanja kita gunakan untuk mengukur keseimbangan belanja. Jika kita ingin mengetahui bagaimanakah keseimbangan dalam anggaran belanja dan

realisasinya, kita akan menggunakan tolak ukur keseimbangan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran tersebut. Analisis selanjutnya yang akan dipakai adalah rasio efisiensi belanja, dimana rasio ini guna mengetahui perbandingan antara realisasi anggaran dan anggaran belanja itu sendiri.

Dengan menggunakan analisis dan rasio yang telah disebutkan, maka kita bisa mengetahui bagaimanakah kinerja anggaran belanja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanjungpinang nantinya. Sebab, masyarakat pada umumnya belum mengetahui bagaimana kinerja aparat pemerintah kota Tanjungpinang terkhusus pada belanja daerah Sekretariat DPRD Kota Tanjungpinang. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat membantu masyarakat dan pemerintahan kota untuk evaluasi dan masukan kedepan.

Dari latar belakang yang telah penulis uraikan, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian “**Analisis Kinerja Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Tanjungpinang**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kinerja belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang tahun 2018 - 2020 dilihat dari analisis varians belanja?

2. Bagaimanakah tingkat pertumbuhan belanja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang tahun 2018 - 2020 dilihat dari analisis pertumbuhan belanja?
3. Bagaimanakah keseimbangan anggaran dan realisasi belanja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang tahun 2018 - 2020 dilihat dari analisis keserasian belanja?
4. Bagaimanakah tingkat penghematan anggaran yang dilakukan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang tahun 2018 - 2020 dilihat dari analisis rasio efisiensi belanja?

1.3 Batasan Masalah

Agar penulisan skripsi ini tidak menyimpang dari pembahasan mengenai kinerja belanja pada Sekretariat DPRD Kota Tanjungpinang maka penulis hanya menetapkan 4 pembahasan pada penelitian pada kali ini yang membahas tentang kinerja belanja menggunakan analisis belanja daerah dengan indikatornya yaitu varians belanja daerah, tingkat pertumbuhan belanja, keserasian belanja dan rasio efisiensi pada Sekretariat DPRD Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2018 – 2020.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian berdasarkan rumusan masalah dan batasan masalahnya pada penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui kinerja belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang tahun 2018 - 2020 dilihat dari analisis varians belanja.
2. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan belanja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang tahun 2018 - 2020 dilihat dari analisis tingkat pertumbuhan belanja.
3. Untuk mengetahui keseimbangan anggaran dan realisasi belanja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang tahun 2018 - 2020 dilihat dari analisis keserasian belanja.
4. Untuk mengetahui tingkat penghematan anggaran belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang tahun 2018 - 2020 dilihat dari rasio efisiensi belanja.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Ilmiah

Kegunaan ilmiah dari penelitian ini ialah untuk memberikan informasi teoritis serta empiris sehingga dapat memberikan pengetahuan serta wawasan bagi peneliti dan pembaca. Kemudian dengan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi penelitian sekaligus menggambarkan kondisi tentang analisis kinerja belanja dalam laporan LRA pada Sekretariat DPRD Kota Tanjungpinang.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi:

1. Sekretariat DPRD Kota Tanjungpinang

Manfaat penelitian bagi DPRD Kota Tanjungpinang ialah diharapkan agar penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi kinerja untuk kedepannya.

2. Bagi Pembaca

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman penelitian terdahulu serta berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan bagi peneliti lainnya yang ingin melakukan penelitian dengan judul yang sama tetapi dengan objek penelitian yang berbeda.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun beberapa sistematika penulisan yang penulis susun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I LATAR BELAKANG

Dalam bab ini dijelaskan secara singkat mengenai gambaran masalah yang menjadi landasan penelitian yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang kajian teori baik teori dasar maupun teori penunjang yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sebagai pedoman atau landasan

konseptual dalam pemecahan masalah. Teori-teori ini diambil dari berbagai sumber literatur dan buku yang mendukung untuk pemecahan masalah.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta jadwal penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang gambaran umum dari objek penelitian serta hasil dan pembahasan dari analisis data.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan serta saran-saran yang berhubungan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntansi Sektor Publik

2.1.1 Definisi Akuntansi Sektor Publik

Ketika ingin menghasilkan laporan keuangan pemerintahan, memperhatikan akuntansi sektor publik adalah hal yang tepat. Saat ini, masyarakat lebih menuntut untuk dilakukannya transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga yang bergerak pada sektor publik. Pemerintahan saat ini juga telah memberikan perhatian terutama akuntansi sektor publiknya. Akuntansi menurut Mardiasmo (2017) adalah aktivitas yang mempunyai tujuan. Kemudian, sektor publik dapat kita pahami sebagai sebuah entitas yang kegiatannya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan pelayanan atau jasa maupun barang guna kepentingan publik dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

Akuntansi sektor publik menurut Bastian (2019) ialah suatu atau sistem mekanisme teknik dan analisa laporan keuangan yang digunakan dalam pengelolaan dana masyarakat pada lembaga Negara dan departemennya seperti pemerintah daerah, BUMN, BUMD, yayasan sosial serta lembaga kerjasama antara sektor publik dan swasta.

Standar Akuntansi Pemerintah adalah konsep, ketentuan, cara, prosedur, metode, teknik yang tersedia baik di Indonesia maupun di dunia International

baik secara teoritis maupun praktis untuk mencatat, mengklasifikasi, mengikhtisarkan, menyesuaikan, melaporkan dan menganalisis, transaksi keuangan pemerintah, yang telah dipilih oleh badan berwenang untuk menyusun standar dan dikodifikasi menjadi Standar (Rusmana et al., 2012).

Menurut Elim & Liando (2016) Akuntansi sektor publik ialah proses mengumpulkan, mencatat, mengklasifikasikan, menganalisa, dan melaporkan transaksi-transaksi keuangan organisasi sektor publik guna menyediakan informasi bagi para pemegang kepentingan untuk mengambil keputusan. Organisasi sektor publik yang termasuk kategori sektor publik yang mengelola dana masyarakat ialah pemerintahan, baik Pemerintahan Pusat maupun Pemerintahan Daerah (Siregar, 2015).

Dari definisi-definisi diatas, dapat kita tarik kesimpulan pengertian dari akuntansi sektor publik ialah suatu kegiatan atau aktivitas yang didalamnya terdapat mekanisme yaitu pencatatan, pengklasifikasian, mengikhtisarkan, menggolongkan dan melaporkan transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu organisasi pemerintahan yang kemudian menjadi suatu laporan keuangan guna memberikan informasi untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.

2.1.2 Tujuan Akuntansi Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (2017) tujuan dari akuntansi sektor publik pada organisasi sektor publik adalah: (1) Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien dan ekonomis atas suatu operasi serta

pengalokasian sumber daya yang telah diberi kepercayaan kepada organisasi. Tujuan tersebut berikatan dengan pengendalian manajemen (*management control*); (2) Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya; dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas (*accountability*).

Kemudian, Sajow et al (2017) menjabarkan secara umum tujuan dan fungsi dari laporan keuangan sektor publik yakni kepatuhan dan pengelolaan, akuntabilitas dan pelaporan prospektif, perencanaan dan informasi otorisasi, kelangsungan organisasi, hubungan masyarakat serta sumber dan fakta gambaran.

Akuntansi sektor publik ini merupakan alat informasi bagi manajemen dan publik. Dari sisi pemerintahan sendiri, informasi dari akuntansi digunakan sebagai proses dalam pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja. Selain itu, informasi akuntansi juga berfungsi sebagai pengambilan keputusan, terutama dalam membantu pengalokasian biaya. Dengan sistem informasi akuntansi, pemerintah dapat menentukan biaya pelayanan publik, biaya standar, dan pembebanan harga kepada publik atas pelayanan (Mardiasmo, 2017).

2.1.3 Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik mempunyai kaitan yang erat dengan penggunaan dan perlakuan akuntansi pada lingkungan publik. Lingkungan pada sektor publik memiliki ruang lingkup wilayah yang lebih luas dan kompleks jika dibandingkan dengan sektor swasta. Perbedaan yang mencolok antara organisasi sektor swasta dengan organisasi sektor publik terletak pada orientasi terhadap laba (Siregar, 2015).

Menurut Mardiasmo (2017) Akuntansi sektor publik memiliki karakteristik, karakteristik ini adalah ciri dan pembeda dari akuntansi sektor non publik atau swasta. Perbedaan pada karakteristik sektor publik bisa dilihat dengan membandingkan beberapa hal yaitu: (1) Tujuan organisasinya ialah bukan motif laba; (2) Sumber pendapatannya ialah pajak, retribusi, utang, obligasi pemerintah, (3) Pertanggungjawabannya kepada masyarakat dan parlemen; (4) Struktur organisasinya berbentuk birokratis, kaku dan hierarkis; (5) Karakteristik anggaran berupa terbuka untuk publik; (6) Sistem akuntansi yang digunakan adalah akuntansi kas.

2.2 Pemerintah Daerah

Pengertian pemerintah daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah ialah

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan diterapkannya otonomi daerah, maka pemerintah daerah telah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelola sendiri daerah nya. Dengan ini pemerintah diharapkan dapat memanfaatkan sumber daya yang ada pada daerah dengan sebaik-baiknya. Pemerintah daerah ialah Gubernur, Walikota/ Bupati, dan seperangkat daerah yang sebagai unsur dari penyelenggara pemerintah daerah. Pemerintahan daerah merupakan penyelenggara pemerintahan daerah otonomi oleh pemerintah dan DPRD yang berdasarkan pada asas desentralisasi (*Hukum Pemerintahan Daerah*, 2015).

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Terdapat dua aspek otonomi yakni otonomi penuh, pada otonomi penuh segala macam urusan dan fungsi pada pemerintahan baik menyangkut substansi sampai ke tata cara penyelenggaraannya. Kemudian yang satu lagi adalah otonomi tidak penuh, yakni daerah hanya mampu melakukan tata cara penyelenggaraan tetapi tidak dengan isi pemerintahannya (*Hukum Pemerintahan Daerah*, 2015).

Dari pernyataan-pernyataan diatas, dapat kita simpulkan bahwa dalam yang disebut dengan pemerintah daerah ialah pemegang pemerintahan daerah yang menyelenggarakan urusan daerah tersebut menurut asas otonomi dan asas otonomi seluas-luasnya. Otonomi yang dimaksud adalah kewenangan pemerintah daerah dalam mengurus sendiri daerahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.3 Penganggaran Sektor Publik

2.3.1 Pengertian Anggaran Sektor Publik

Anggaran adalah pernyataan tentang suatu estimasi kinerja yang ingin dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran keuangan/ finansial (Mahsun et al., 2013). Menurut Munandar (2015) Budget (anggaran) ialah suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam satuan keuangan (unit moneter) dan berjangka waktu tertentu. Sehingga anggaran ialah batas maksimal pengeluaran bagi suatu pemerintahan atau instansi. Anggaran juga merupakan rencana keuangan yang berisikan rancangan dan estimasi pengeluaran yang telah disepakati (Sujarweni, 2015).

Masyarakat menginginkan hal yang terbaik bagi kepentingan bangsa dan negara, akuntabilitas publik pun menjadi poin penting dalam penyusunan anggaran. Menurut Moh. Mahsun et al (2013) dalam organisasi sektor publik, anggaran ini merupakan alat pertanggungjawaban dari pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik.

penganggaran ini merupakan kegiatan yang penting karena berkaitan dengan proses penentuan pengalokasian dana untuk tiap program ataupun kegiatan.

Anggaran ialah pernyataan tentang estimasi kinerja yang ingin dicapai dalam periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran keuangan atau finansial, sedangkan penganggaran ialah proses atau metode dalam mempersiapkan anggaran. Anggaran sektor publik merupakan suatu dokumen yang di dalamnya menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi publik yang berisikan mengenai pendapatan, belanda dan aktivitas-aktivitas (Mardiasmo, 2017).

Sehingga dapat kita katakana bahwa penganggaran sektor publik ialah aktivitas atau proses dalam mempersiapkan anggaran yang merupakan gambaran dari kondisi keuangan suatu organsasi publik berupa estimasi kinerja yang ingin dicapai pada suatu periode tertentu.

2.3.2 Fungsi Anggaran Sektor Publik

Menururt Mardiasmo (2017) anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi yang utama yaitu:

1. Anggaran sebagai alat perencanaan, yakni sebagai alat untuk mecapai tujuan organisasi. Serta untuk menentukan tujuan dan sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.
2. Anggaran sebagai alat pengendalian, yaitu anggaran memberikan rencana detail agar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

3. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal, digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi.
4. Anggaran sebagai alat politik, untuk menentukan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan kepada prioritas itu.
5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi, yakni mengkoordinasikan serta mengkomunikasikan antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif.
6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja, anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja.
7. Anggaran sebagai alat motivasi, yakni untuk memotivasi manajer dan staffnya agar bekerja lebih efektif dan efisien dalam mencapai target serta tujuan.
8. Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik, maksudnya ialah anggaran ini tidak boleh diabaikan. Anggaran juga sebagai alat untuk menyuarakan suara masyarakat.

2.4 Analisa Laporan Keuangan

2.4.1 Definisi Analisa Laporan Keuangan

Analisa laporan keuangan adalah proses mengidentifikasi, menilai serta membandingkan laporan keuangan yang dibuat, perbandingan yang dimaksud ialah membandingkan semua jenis laporan keuangan tahun berjalan dengan tahun-tahun lainnya (Putra et al., 2021). Kemudian menurut Prastowo (2018) analisis laporan keuangan adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta menghubungkan antar bagian

untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti secara keseluruhan.

Ketika ingin melihat informasi dalam laporan keuangan, tentu pembaca harus memahami dulu laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan dapat memberikan informasi bagi para pembaca dan pemangku kepentingan guna pengambilan keputusan dan melakukan analisis. Menurut Fahmi (2017) laporan keuangan adalah penggambaran keadaan keuangan suatu perusahaan dan informasi yang ada dalam laporan keuangan dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan. Gambaran kinerja itulah yang menjadi tujuan dari analisis laporan keuangan, agar lebih menjabarkan bagaimana keadaan serta kinerja yang dapat dilihat dengan tujuan mengevaluasi hasil kerja dalam suatu periode tertentu.

Sehingga analisis laporan keuangan ialah kegiatan proses dalam menjabarkan, mendalami, menguraikan serta mempelajari laporan keuangan pada setiap unsur yang bertujuan untuk memperoleh informasi pemahaman serta acuan dalam kinerja kedepannya atas laporan keuangan tersebut.

2.4.2 Komponen Laporan Keuangan

Pernyataan Standar Akuntansi pemerintahan Berbasis AkruaI (PSAP BA) 01 dalam paragraph 14 (Tanjung, 2014) diterangkan komponen-komponen yang ada dalam laporan keuangan lengkap terdiri dari laporan pelaksanaan

anggaran dan laporan finansial. Komponen tersebut masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan ini menyediakan iktisar sumber, alokasi serta sumber daya yang telah dipakai dan dikelola baik pemerintahan pusat maupun daerah yang didalamnya menampilkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya. Masing-masing struktur Dalam Laporan Realisasi Anggaran yang tercantum pada PSAP BA 01 paragraph 17 dalam Tanjung (2014) ialah:

- a. Pendapatan-LRA, ialah segala penambahan saldo anggaran lebih dalam penerimaan rekening kas umum negara/ daerah dalam periode tahun anggaran yang ditetapkan dan tidak perlu dibayarkan kembali karena telah menjadi hak pemerintah.
- b. Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi saldo anggaran lebih dari rekening kas umum nenara/ daerah dalam periode tahun anggaran yang ditetapkan dan tidak akan diterima pembayaran kembali dari pemerintah.
- c. Transfer, merupakan penerimaan/ pengeluaran uan dari suatu entitas ke entitas lainnya, termasuk juga dana perimbangan serta dana bagi hasil.
- d. Surplus/ defisit LRA, ialah selisih kurang atau selisih lebih antara pendapatan LRA dan belanja selama satu periode.
- e. Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayarkan kembali dengan pengeluaran yang akan diterima kembali.

f. SILPA/ SIKPA adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi pendapatan LRA dengan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD/ APBN selama satu periode pelaporan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan ini menyajikan informasi mengenai turun atau naiknya SAL tahun pelaporan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca

Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.

4. Laporan Operasional (LO)

Ini adalah laporan yang harus disusun pemerintah daerah, manfaat dari laporan ini adalah tersedianya informasi tentang seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan dan penyajian yang disandingkan dengan periode sebelumnya.

5. Laporan Arus Kas

Laporan ini memberikan informasi kas yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan ini memberikan informasi mengenai kenaikan dan penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7. Catatan Atas Laporan Keuangan

Mencakup penjelasan tentang rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan, selain itu CALK juga meliputi kebijakan akuntansi yang diperuntukan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan untuk diungkapkan.

2.5 Kinerja Anggaran Belanja

Kinerja (*performance*) ialah gambaran tentang pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi/visi organisasi yang terdapat dalam rencana strategi pada suatu organisasi. Kemudian, pengukuran kinerja adalah suatu kegiatan menilai pencapaian target-target yang telah ditentukan dari tujuan strategis organisasi (Mohamad Mahsun, 2016) Pengukuran kinerja ini merupakan alat manajemen yang berguna untuk meningkatkan kualitas dalam mengambil keputusan. Dengan menggunakan sistem berbasis kinerja ini, diharapkan pada setiap pegawai dapat tertanam semangat untuk melakukan efisiensi pada setiap belanja mutlak. Kemudian yang ingin dilihat dari kinerja ini ialah kinerja anggaran belanjanya. Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran adalah komponen penting yang menjadi perhatian bagi publik (Mahmudi, 2019).

2.6 Analisis Belanja

Sifat belanja yang rentan dan dan mudah dilakukan membutuhkan perencanaan, pengawasan. Masyarakat sebagai pemberi dana publik melalui pajak daerah memiliki kepentingan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan

dana tersebut apakah sesuai dengan yang seharusnya, efisien serta efektif (Mahmudi, 2016b). Setelah dibelanjakan dan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional, analisis belanja harus dilakukan sebagai bahan evaluasi, koreksi, dan perbaikan ke depannya.

Berdasarkan Undang-undang nomor 17 tahun 2003 pasal 3 ayat 1 tentang keuangan negara yakni “Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.” Kemudian belanja daerah menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 adalah seluruh kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah melingkupi seluruh pengeluaran dari Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar. Belanja daerah juga dipergunakan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintahan provinsi/ kota yang terdiri atas kepentingan wajib serta pilihan yang telah ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Menurut Mahmudi (2016b) Belanja daerah adalah seluruh pengeluaran yang mengurangi kekayaan atau modal dana lancar dari rekening KUD dalam periode yang telah ditentukan kemudian tidak akan memperoleh pembayaran kembali dari pemerintah daerah. Belanja dalam laporan keuangan adalah bagian penting sehingga menjadi sorotan karena masyarakat sebagai pemberi dana melalui pajak daerah. Masyarakat berkepentingan untuk mengetahui apakah

dana yang telah mereka keluarkan telah dikelola dengan baik dan semestinya serta bertujuan untuk kepentingan publik. belanja juga mencerminkan kebijakan pemerintah dalam pembangunan.

Sangat penting analisis belanja daerah dilakukan guna mengavaluasi pemerintah daerah dalam menggunakan APBD secara ekonomis, efektif dan efisien. Analisis ini mengukur sejauh mana pemerintah daerah melakukan efisiensi anggaran, dan menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan tidak tepat sasaran. Hal ini berkaitan dengan kinerja anggaran belanja. Berdasarkan informasi pada LRA, menurut Mahmudi (2016b), Tantri & Irmawati (2018) terdapat analisis anggaran khususnya belanja yang dapat digunakan yaitu:

1. Analisis Varians

Menurut Mahmudi (2016b) belanja daerah memiliki ketentuan yakni anggaran belanja adalah batas maksimal pengeluaran yang boleh dilakukan pemerintah daerah. Analisis varians adalah analisis selisih antara realisasi belanja dengan anggarannya. Analisis ini terbilang sederhana tetapi informasi yang dihasilkan sangatlah berguna. Pembaca laporan dapat mengetahui langsung berapa besar varians anggaran belanja dengan realisasinya yang bisa dinyatakan dalam bentuk nilai nominal atau persentase.

Apabila realisasi belanja tidak melebihi target maka kinerja pemerintah daerah dapat dinilai baik. Sebaliknya, jika realisasi belanja lebih besar dari jumlah anggaran maka hal tersebut memungkinkan bahwa

terdapat kinerja belanja yang kurang baik pada pemerintahan (Mawikere et al., 2015). Menurut Mahmudi (2016b) dalam melakukan analisis varians anggaran, tidak hanya terpaku pada persentase penghematan yang dilakukan, tetapi juga nominalnya. Meskipun secara persentase kecil, tetapi jika secara nominal cukup signifikan, maka dapat dikatakan kinerjanya baik. Jika penyerapan anggaran terlalu rendah, di bawah 90% justru bisa jadi dinilai kurang baik karena mengesankan adanya kelemahan dalam perencanaan anggaran. Adapun kriteria varian belanja adalah sebagai berikut:

Kriteria Varians Belanja	Ukuran
Baik	Realisasi Belanja < Anggaran Belanja
Kurang Baik	Realisasi Belanja > Anggaran Belanja

Sumber: (Mahmudi, 2016b)

Kemudian menurut Suhaedi (2019) batas maksimum dari pengeluaran belanja adalah nilai anggaran. Dengan efisiensi belanja, kinerja pemerintah daerah dinilai baik dan sebaliknya jika realisasi lebih besar maka hal tersebut mengindikasikan ada yang kurang dengan kinerja pemerintahan. Terdapat dua kategori dalam anggaran menurut Kainde (2013) yaitu selisih disukai (*favourable variance*) yaitu realisasi belanja lebih kecil dari anggarannya dan selisih tidak disukai (*unfavourable variance*) adalah jika realisasi lebih besar dari anggarannya. Kedua selisih ini dapat kita lihat dari anggaran dan realisasi belanja, Dari selisih ini dapat kita lihat seberapa besar nilai realisasi yang telah diwujudkan oleh pemerintah/ instansi. Selisih

disukai adalah selisih yang diinginkan karena menunjukkan adanya kinerja yang baik pada pemerintah.

Varians dapat dijadikan alat analisis guna mengevaluasi pelaksanaan anggaran organisasi sektor publik karena varians diyakini dapat memberikan indikasi atau suatu peringatan jika operasi tidak berjalan sesuai dengan rencana awal (Witjaksono, 2013). Dengan analisis varians, yakni analisis yang sistematis dari dua data dapat ditarik analisis apabila terjadinya suatu penyimpangan atau varians yang dapat ditelusuri lebih dalam (Wahyu Niansyah & Biswan, 2018). Kita melihat seberapa besar perbedaan selisihnya dan dapat menarik kesimpulan serta analisis dari data/ informasi tersebut.

Analisis varians dapat menggunakan rumus:

$$\text{Analisis Varians Belanja} = \text{Realisasi Belanja} - \text{Anggaran}$$

Sumber: (Mahmudi, 2016b)

2. Analisis Pertumbuhan Belanja

Dalam Mahmudi (2016b) analisis pertumbuhan belanja mempunyai manfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Umumnya pertumbuhan belanja ini cenderung selalu naik, alasannya ialah penyesuaian terhadap inflasi, kurs rupiah, perubahan jumlah cakupan layanan, dan lain-lain. Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui tingkat pertumbuhan belanja yang dianggarkan Pemerintah Daerah dari tahun ke tahun positif atau negatif (Palimbongan, 2019).

Menurut Kainde (2013) dalam paradigma baru otonomi daerah, pemerintah daerah harus dapat mengendalikan belanja daerah dan melakukan efisiensi belanja dan penghematan anggaran.

Analisis pertumbuhan belanja bertujuan melihat bagaimana perkembangan belanja daerah baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung selama periode yang dianalisis. Rasio pertumbuhan mengukur besarnya kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan serta meningkatkan kemampuan/ keberhasilan yang telah tercapai pada tahun sebelum (Christina et al., 2018). Dengan diukurnya kemampuan tersebut dapat menjadi informasi serta bahan evaluasi kedepannya.

Belanja daerah biasanya memiliki sifat naik turun, ketika nilai belanja daerah naik biasanya terjadi karena adanya penyesuaian inflasi, perubahan nilai tukar rupiah, perubahan pada cakupan layanan dan penyesuaian faktor makro ekonomi (Rawis et al., 2020). Kenaikan wajar atau tidak dapat dilihat dari penyebab yang telah disebutkan, hal-hal tersebut dapat terjadi baik itu dengan sebab internal yang cenderung terencana dan dapat dikendalikan kemudian faktor eksternal yang berada diluar kendali oleh pemerintah daerah.

Pertumbuhan belanja daerah dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Pertumbuhan Belanja Tahun}_t = \frac{\text{Realisasi Belanja Thn}_t - \text{Realisasi Belanja Thn}_{t-1}}{\text{Realisasi Belanja Thn}_{t-1}}$$

Sumber: (Mahmudi, 2019)

Indikator:

t = Tahun yang ingin dihitung

t-1 = Tahun yang ingin dihitung dikurang 1 tahun kebelakang

3. Analisis Keserasian Belanja

Manfaat analisis keserasian belanja menurut Mahmudi (2016) ialah untuk mengetahui keseimbangan antar belanja. Fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi berkaitan dengan analisis keserasian ini. Agar fungsi anggaran dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka pemerintah daerah perlu membuat harmonisasi belanja. Analisis keserasian belanja yakni berupa: (1) Analisis Belanja per Fungsi terhadap Total Belanja; (2) Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja; (3) Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja, dan yang terakhir; (4) Analisis Belanja Langsung dan Tidak Langsung.

Menurut Suhaedi (2019) analisis keserasian adalah rasio yang mendeskripsikan aktivitas pemerintah daerah yang mengedepankan alokasi dana pada belanja rutin dan belanja modal dengan optimal. Sehingga keserasian ini dapat kita nilai dengan seberapa besar keseimbangan yang ada di dalam belanja pemerintahan.

Semakin tinggi nilai persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin maka persentase belanja investasi yang dipakai untuk penyediaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat semakin kecil (Halim & Kusufi, 2012).

Keserasian belanja mempunyai manfaat untuk mengetahui apakah adanya keseimbangan dalam belanja yang telah dilakukan oleh pemerintah. Menurut Abdal et al (2018) hal tersebut mempunyai kaitan dengan fungsi pada suatu anggaran sebagai alat alokasi dana, alat retribusi dana serta alat keseimbangan. Agar fungsi anggaran berjalan maksimal, maka pemerintah dapat membuat harmonisasi belanja.

Adapun menurut Mahmudi (2019) rumus keserasian belanja ialah:

$$\text{Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}}$$

Sumber: (Mahmudi, 2019)

$$\text{Belanja Operasi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

Sumber: (Mahmudi, 2019)

4. Rasio Efisiensi Belanja

Menurut Mahmudi (2019) rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah, berupa angka efisiensi yang relative dan tidak mutlak. Artinya tidak ada standar baku yang dianggap baik pada rasio ini. Semakin kecil nilai rasio maka semakin efisien kinerja pemerintah daerah melakukan anggaran belanja daerah. Kita dapat menyatakan dengan pendapat

berdasarkan rasio bahwa tahun ini belanja pemerintah relatif lebih efisien dari pada tahun lalu.

Angka yang dihasilkan oleh rasio efisiensi tidak bersifat mutlak tetapi relatif yang berarti tidak ada standar baku untuk rasio efisiensi (Elim & Liando, 2016). Efisiensi anggaran dapat dinilai baik apabila pemerintah daerah menghasilkan rasio efisiensi anggaran kurang dari 100%, dan sebaliknya jika lebih dari 100% maka mengindikasikan terjadinya pemborosan anggaran (Rawis et al., 2020). Adapun kriteria efisiensi belanja menurut Mahsun dalam Rina & Haryadi (2020) yaitu:

Kriteria Efisiensi	Persentase Efisiensi
Tidak Efisien	100% ke atas
Efisien Berimbang	100%
Kurang dari 100%	Efisien

Sumber: Mahsun dalam Rina & Haryadi (2020)

Adapun rumus yang dapat kita gunakan untuk menghitung rasio efisiensi adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Sumber: (Mahmudi, 2019)

2.7 Kerangka Pemikiran

Tabel 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber: Konsep Yang Disesuaikan Untuk Penelitian, 2021

2.8 Penelitian Terdahulu

1. Mawikere, Sabijono, Palilingan (2015)

Dalam penelitian yang berjudul “Analisis Kinerja Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Dinas Pendapatan Kota Manado”. Kebutuhan masyarakat yang meningkat mendorong pemerintah daerah untuk mengupayakan peningkatan penerimaan daerah dengan memberi

perhatian kepada perkembangan PAD. Sumber-sumber PAD adalah hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil laba usaha daerah, dan PAD lainnya yang sah. Dengan ini pemerintah pun lebih berupaya dan leluasa dalam mengurus daerahnya sendiri sejak diterapkannya otonomi daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Analisis Kinerja Belanja dalam LRA pada Dinas Pendapatan Kota Manado. Metode penelitian yang digunakan ialah deskriptif. Objek penelitian yakni pada Dinas Pendapatan Kota Manado. Kinerja belanja pemerintah Kota Manado berdasarkan analisis varians secara umum dikatakan baik, pertumbuhan belanjanya pun positif dan kinerja Pemerintah kota Manado dari analisis pembiayaan secara umum sudah baik terlihat dari SILPA yang bersaldo positif yang berarti pemerintah manado sudah tepat dalam penyajian suatu rencana anggaran.

2. Makka, Saerang, Elim (2015)

Dalam penelitian yang berjudul “Analisis Kinerja Belanja Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kota Kotamobagu”. Lembaga pemerintah dibentuk umumnya untuk menjalankan aktivitas layanan terhadap masyarakat luas yang tujuannya bukan mencari keuntungan. Tujuan yang akan dicapai biasanya ditentukan dalam bentuk kualitatif. Laporan Realisasi Anggaran yang dipublikasikan pemerintah daerah memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk menilai kinerja keuangan daerah. Tujuan penelitian ini

adalah untuk mengetahui kinerja belanja dalam LRA pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKAD) Di Kotamobagu Tahun Anggaran 2013-2014.

3. Tantri, Irmawati (2018)

Dalam penelitian berjudul “Analisis Kinerja Anggaran Belanja pada Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2016”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja anggaran belanja Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012-2016. Metode yang digunakan ialah metode kualitatif menggunakan analisis deskriptif. Analisis yang digunakan adalah analisis varians belanja, analisis pertumbuhan belanja, analisis keseraqsian belanja, rasio efisiensi belanja dan rasio efektivitas belanja. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa secara keseluruhan, kinerja anggaran belanja Dinas Kebudayaan Daerah istimewa Yogyakarta tahun 2012-2016 baik walaupun terdapat terdapat salah satu program yang tidak berjalan secara efisien.

4. Palimbongan (2019)

Dalam penelitian yang berjudul “Analisis Kinerja Anggaran Belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja anggaran belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon pada periode anggaran 2013-2017. Penelitian ini disusun menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pada anggaran

yang digunakan lebih kecil dari anggaran yang telah direncanakan. Berdasarkan hasil analisa didapatkan bahwa adanya hasil positif dalam kinerja belanja yang menunjukkan kinerja belanja dinilai baik.

5. Ratnasari, Munawaroh (2019)

Dalam penelitian yang berjudul “Analisis Kinerja Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Dinas Sosial Kabupaten Berau”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Sosial Kabupaten Berau. Metode yang digunakan ialah deskriptif kuantitatif. Alat analisis yang digunakan ialah analisis varians belanja, analisis pertumbuhan belanja, analisis keserasian belanja, dan analisis efisiensi belanja. Hasil dari penelitian tersebut ialah menolak hipotesis yang telah diajukan sebelumnya karena kinerja belanja dalam LRA pada Dinas Sosial Kabupaten Berau menurun pada tahun 2017.

6. Sajow, Morasa, Wokas (2017)

Dalam penelitian yang berjudul “Analisis Realisasi Anggaran Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Tomohon dan Pemerintahan Kabupaten Minahasa Selatan” tujuannya ialah guna menganalisis realisasi anggaran belanja daerah pada Pemerintah Kota Tomohon dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Penelitian ini disusun menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif. Dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkan efisiensi belanja Pemerintah Kota Tomohon dan Pemerintah Kota Minahasa

Selatan tahun 2013 – 2015 efisien, kemudian untuk tingkat efektivitas didapatkan hasil yang efektif dalam realisasi anggarannya. Untuk hasil pertumbuhan belanja menunjukkan bahwa untuk tahun anggaran 2013 – 2015 adanya pertumbuhan belanja.

7. Enumbi (2021)

Dalam penelitian yang berjudul “An Analysis of Financial Performance of the Puncak Jaya Regency Government” tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan Kabupaten Puncak Jaya Pemerintah Kabupaten pada periode 2014 – 2018. Penelitian ini disusun menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa pada rasio desentralisasi fiskal masih sangat kecil dan pendapatan asli daerah kurang mampu dalam mendanai pembangunan daerah. Rasio swasembada masih di bawah standar keuangan daerah karena ketidak mampuan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Dalam rasio efektivitas, pendapatan asli daerah yang ditargetkan dan direalisasikan secara keseluruhan dinyatakan tidak efektif. Namun pendapatan asli daerah dinilai efisien karena Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya mengatur pengeluaran sesuai dengan pendapatan yang ada.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yang dilakukan untuk menganalisis realisasi anggaran belanja guna melihat kinerja belanja pada Sekretariat DPRD Kota Tanjungpinang. Menurut Prastowo (2016) penelitian kualitatif ialah suatu jalan penelitian sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu objek pada latar alamiah yang di dalamnya mencantumkan keadaan sebenarnya tanpa dimanipulasi dan tidak ada pengujian hipotesis, yang kemudian hasil penelitian yang diharapkan nantinya berupa makna dari fenomena yang diamati. Adapun metode deskriptif ialah suatu metode yang digunakan untuk meneliti keadaan sekelompok manusia, suatu objek, kondisi, sistem pemikiran, ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang. Penelitian deskriptif tidak ditujukan untuk menuji hipotesis, melainkan hanya menggambarkan keadaan atau kondisi tentang suatu variabel, gejala atau keadaan.

Metode kualitatif merupakan metode yang mempunyai fokus pada pengamatan mendalam. Penggunaan metode ini dapat menghasilkan penelitian atas suatu fenomena yang lebih menyeluruh. Metode penelitian kualitatif juga digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang “apa (*what*)”, “bagaimana (*how*)” dan mengapa (*why*)” (Ardianto, 2019).

3.2 Jenis data

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data yakni data primer dan data sekunder. Menurut Palimbongan (2019) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, lalu selebihnya ialah data tambahan seperti dokumen dan lainnya.

Data primer diperoleh secara langsung ke objek penelitian dengan cara survei maupun sensus, dengan seperti itu data primer dapat kita katakan sebagai data yang akurat. Data primer adalah data yang mempunyai fungsi untuk membantu peneliti dalam mencari jawaban yang diperoleh langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, pendapat individu atau kelompok (orang). Kelebihan dari data primer ialah data lebih mencerminkan kebenaran berdasarkan pada pandangan seseorang yang dapat langsung dilihat dan didengar oleh peneliti (Sitoresmi, 2021).

Data sekunder merupakan sumber data yang didapatkan peneliti dengan cara yang tidak langsung melalui media perantara yakni dicatat oleh pihak lain (Syafnidawaty, 2020). Kemudian, menurut Arikunto (2013) data sekunder ini dapat kita peroleh dari dokumen grafis seperti tabel, notulen rapat, catatan, foto, film, rekaman video dan lainnya yang dapat memperkaya data primer.

Data primer yang didapatkan pada penelitian ini ialah hasil wawancara dengan narasumber yang berkaitan langsung dengan variabel penelitian. Narasumber yang akan menjadi informan sebanyak 3 orang yakni bapak H.

Efendi, S.Sos., MM sebagai Sekwan atau Sekretaris Dewan sekaligus pengguna anggaran (PA), kemudian ibu Susi Susanti, S.E sebagai Kassubag Keuangan dan Program dan narasumber terakhir ialah Ibu Idawati, S.Sos sebagai Staff keuangan yang menyusun anggaran pada Sekretariat DPRD Kota Tanjungpinang.

Sedangkan data sekunder pada penelitian ini didapatkan dari dari tempat penelitian berupa data Laporan Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2018 - 2020.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara dalam mengumpulkan informasi atau fakta yang ada dilapangan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

1. Dokumentasi

Teknik ini dilakukan dengan cara pengumpulan data secara tidak langsung yang ditujukan pada subjek peneliti tetapi dengan menggunakan dokumentasi. Dokumen yang digunakan ialah Laporan Realisasi Anggaran DPRD Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2018 sampai dengan 2020.

2. Wawancara

Teknik pengumpulan data ke lapangan dengan cara wawancara langsung dengan tiga narasumber yang berkaitan langsung dengan anggaran belanja yaitu bapak H. Efendi, S.Sos., MM dengan jabatan sebagai Sekretaris Dewan dan Pengguna Anggaran (PA) kemudian Ibu Lusi

Susansi, S.E sebagai Kassubbag Keuangan dan Program dan yang terakhir ialah Ibu idawati S.Sos dengan jabatan staff keuangan yang menyusun anggaran pada Sekretariat DPRD Kota Tanjungpinang.

3. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka ini dilakukan dengan mempelajari, memahami serta mengutip teori maupun konsep baik dari literatur, jurnal, para ahli maupun tulisan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Studi pustaka dapat dilakukan dengan mencari literatur tentang berebagai teori yang mempunyai kaitan dengan topik penelitian melalui buku di perpustakaan.

3.4 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam menganalisis data pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dalam analisis kinerja belanja yakni dengan melakukan analisa terhadap varians belanja, pertumbuhan belanja, keserasian belanja, dan rasio efisiensi belanja pada Sekretariat DPRD Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2018 – 2020. Peneliti menggunakan analisa deskriptif yang mana analisa ini merupakan penjelas yang sifatnya memperkuat hasil dari analisis kualitatif yang diharapkan dapat memberikan pejelasan terhadap kesimpulan yang didapatkan dan mempermudah dalam pengambilan keputusan. Berikut metode yang digunakan dalam penelitian:

1. Melakukan pra-survei yang berguna untuk melihat kondisi dari objek yang akan kita teliti dan melihat kondisi serta fenomena lapangan.
2. Mempelajari serta memahami teori tentang analisis belanja daerah
3. Mengumpulkan informasi dan data yang dibutuhkan yakni berkaitan dengan realisasi anggaran belanja pada Laporan Realisasi Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2018 – 2020.
4. Mempelajari data yang diperoleh yang berkaitan dengan analisis belanja daerah yakni menggunakan alat analisis varians belanja, pertumbuhan belanja, keserasian belanja dan rasio efisiensi belanja.
5. Melakukan analisis data dengan kualitatif. Analisis ini meliputi:
 - a. Varians belanja

$$\text{Analisis Varians Belanja} = \text{Realisasi Belanja} - \text{Anggaran Belanja}$$

Sumber: (Mahmudi, 2016b)

- b. Rasio Pertumbuhan belanja

$$\text{Pertumbuhan Belanja Tahun}_t = \frac{\text{Rea. Belanja Thn}_t - \text{Rea. Belanja Thn}_{t-1}}{\text{Rea. Belanja Thn}_{t-1}} \times 100\%$$

Sumber: (Mahmudi, 2019)

Indikator:

t = Tahun yang ingin dihitung

t-1 = Tahun yang ingin dihitung dikurang 1 tahun kebelakang

c. Keceragaman Belanja

$$\text{Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

$$\text{Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

Sumber: (Mahmudi, 2019)

d. Rasio Efisiensi Belanja

$$\text{Rasio} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Sumber: (Mahmudi, 2019)

DAFTAR PUSTAKA

- Abdal, Herabudin, & Saodah, S. (2018). Analisis Keserasian Belanja Daerah Kabupaten Garut. *Publica: Jurnal Pemikir Administrasi Negara*, 10(2), 87–95.
- Ardianto, Y. (2019). *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.html>
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Pendekatan Suatu Pendekatan Praktik* (Revisi). PT Rineka Cipta.
- Bastian, I. (2019). Lingkup Akuntansi Sektor Publik. In *Lingkup Akuntansi Sektor Publik*.
- Christina, G., Iskandar, R., & Irwansyah, I. (2018). Analisis Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Pedalaman dan Daerah Tertinggal. *KINERJA*, 14(2). <https://doi.org/10.29264/jkin.v14i2.2482>
- Elim, I., & Liando, G. Y. (2016). Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1). <https://doi.org/10.35794/emba.v4i1.12369>
- Enumbi, Y. (2021). An Analysis of Financial Performance of the Puncak Jaya Regency Government. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(1). <https://doi.org/10.33258/birci.v4i1.1660>

- Fahmi, I. (2017). *Analisis Laporan Keuangan* (D. Handi (Ed.)). Alfabeta.
- Halim, A., & Kusufi, S. (2012). *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep dan Aplikasi*. Salemba Empat.
- Hukum Pemerintahan Daerah*. (2015). Pemerintah Kabupaten Buleleng Bagian Hukum. <https://hukumsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/hukum-pemerintahan-daerah-56>
- Indriyani, E., & Sulistiyawati, S. (2021). Kebijakan Refocussing dan Realokasi Anggaran Tahun Anggaran 2021 serta Pengaruhnya dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia Akibat Dampak Pandemi Covid- 19. *Kementrian Kelautan Dan Perikanan, Covid-19*, 3.
- Kainde, C. (2013). Analisis Varians Dan Pertumbuhan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Bitung. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3), 393–400. <https://doi.org/10.35794/emba.v1i3.1838>
- Mahmudi. (2016a). *Akuntansi Sektor Publik*. UII Press.
- Mahmudi. (2016b). *Analisa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (Keempat). UPP STIM YKPN.
- Mahsun, Moh., Sulistyowati, F., & Purwanugraha, H. A. (2013). *Akuntansi Sektor Publik*. BPFE.
- Mahsun, Mohamad. (2016). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE.

- Makka, H. Al, Saerang, D. P. ., & Elim, I. (2015). Analisis Kinerja Belanja Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kota Kotamobagu. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(4), 324–333.
- Mardiasmo. (2017). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi.
- Mawikere, L., Sabijono, H., & Palilingan, A. F. (2015). Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pada Dinas Pendapatan Kota Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(1).
- Munandar, M. (2015). *Budgeting: Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja, Pengawasan Kerja* (Kedua). BPFE.
- Palimbongan, R. R. (2019). Analisis Kinerja Anggaran Belanja pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon. 7(4), 4888–4897.
- Pengertian, Prinsip dan Penerapan Good Governance di Indonesia*. (2017). Bulelengkab.Go.Id. <https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/pengertian-prinsip-dan-penerapan-good-governance-di-indonesia-99>
- Permendagri. (2006). *Peraturan Kementrian Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Belanja Daerah*.
- Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 9 Tahun 2015)*. (n.d.).
- Prastowo, A. (2016). *Metode Penekitian Kualitatif: dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Ar-Ruzz Media.

- Prastowo, D. (2018). *Analisis Laporan Keuangan: Konsep dan Aplikasi*. UPP STIM YKPN.
- Putra, I. G. S., Affandi, H. A. A., Purnamasaari, L., & Sunarsi, D. (2021). *Analisis Laporan Keuangan*. Cipta Media Nusantara.
- Rawis, S. D., Manossoh, H., & Pusung, R. J. (2020). *Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Tahun 2016-2018)*. 8(4), 805–814.
- Rina, E., & Haryadi, M. (2020). Analisis Kinerja Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur. *Ekonomia*, 1–11. <http://ejournal.untagsmd.ac.id/index.php/EKM/article/view/4893>
- Rusmana, O., Martani, D., Warsidi, & Afiah, N. N. (2012). *Akuntansi pemerintahan Indonesia*.
- Sajow, C., Morasa, J., & Wokas, H. R. N. (2017). Analisis Realisasi Anggaran Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Tomohon dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. *EMBA*, 5(2), 1214–1224.
- Siregar, B. (2015). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual*. UPP STIM YKPN.
- Sitoresmi, A. R. (2021). *Data Primer*. <https://hot.liputan6.com/>
- Suhaedi, W. (2019). Analisis Belanja Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 18(2), 63. <http://aksioma.unram.ac.id/index.php/aksioma/article/view/82>

- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Pustaka Baru Press Yogyakarta.
- Syafnidawaty. (2020). *Data Sekunder*. <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-sekunder/>
- Tanjung, A. H. (2014). *Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual*. Penerbit Alfabet.
- Tanjungpinang, P. W. (2019). *Peraturan Walikota Tanjungpinang Tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Tanjungpinang (Peraturan Walikota No. 48 Tahun 2019)*.
- Tanjungpinang, P. W. K. (2016). *Peraturan Walikota Tanjungpinang Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Tanjungpinang (Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2016)*.
- Tantri, S. N., & Irmawati, P. (2018). Analisis Kinerja Anggaran Belanja pada Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2016. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 1(1), 27–37. <https://doi.org/10.18196/jati.010103>
- Undang-undang Republik Indonesia Tentang Keuangan Negara (UU no. 17 Tahun 2003 pasal 3 ayat 1)*. (2003).
- Undang-undang Republik Indonesia Tentang Pemerintahan Daerah (No. 23 Tahun 2014)*. (2014).
- Undang-undang Republik Indonesia Tentang Perangkat Daerah (UU No. 18 Tahun 2016)*. (n.d.).
- Undang-undang Republik Indonesia Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU No. 33 Tahun 2004)*. (2004).

Visi dan Misi. (2020).

Wahyu Niansyah, F. I., & Biswan, A. T. (2018). Analisis Varians Anggaran Belanja untuk Pengukuran Kinerja. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 3(4), 348–363.
<https://doi.org/10.33105/itrev.v3i4.79>

Witjaksono, A. (2013). *Akuntansi Biaya* (Edisi Revi). Graha Ilmu.

CURICULUM VITAE



Nama : Anatasya Veronika Oscar

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat Tanggal Lahir : Tanjungpinang, 15 November 2000

Status : Belum Menikah

Agama : Islam

Email : anatasyaoscar@gmail.com

No HP : 082384020265

Sosial Media : @anatasyaoscar

Alamat : Jl. Garuda perum Kenangan Jaya 9 Blok A nomor 10

Pekerjaan : Belum Bekerja

Pendidikan : SD Negeri 001 Bukit Bestari (2006 – 2012)
SMP Negeri 5 Tanjungpinang (2012 – 2015)
SMA Negeri 1 Tanjungpinang (2015 – 2018)
STIE Pembangunan Tanjungpinang (2018 – 2022)